**BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam pengambilan data dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 no 14 Marindal, Medan, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatra Utara.

**B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Empiris diartikan sebagai kajian terhadap fakta yang timbul di lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan mengkaji hukum yang timbul dalam perilaku masyarakat.33 primer yang didapat dari fakta penelitian lapangan.

**C. Sumber Data**

Data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yakti data sekunder dan data sekunder, adapun yang dimaksud dengan kedua data tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara atau interview langsung kepada narasumber dan responden. Sumber data didapatkan dengan kegiatan wawancara di lapangan mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan di lingkup Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara.34

33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

34 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 113.

40

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan perolehan data melalui studi kepustakaan serta penelaahan melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini,35

Adapaun sumber data sekunder dapat dikutip dari :

a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP).

2) Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

3) Undang-undang No 18 tahun 2013 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

b. Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan serta menunjang bahan hukum primer berupa makalah dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , berupa hasil pencarian dalam internet.36

**D. Teknik Pengumpulan Data**

berikut :

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai

1. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan berbagai sumber bacaan melalui buku, internet, jurnal ilmiah, maupun pendapat para sarjana. Pengolahan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan menjadi

lebih sistematis dan teratur.37

35 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

36 *Ibid*., hlm. 117.

37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hlm. 52.

2. Penelitian Lapangan

Data penelitian diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan prosedur pengambilan informasi, menganalisis, serta penjelasan mengenai pendapat yang berkaitan dengan penerapan hukum melalui tahap yang disebut dengan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang dilakukan langsung di lapangan dengan menentukan langsung narasumber agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.38

**E. Teknik Analisi Data**

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data di atas, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.39 Dengan keseluruhan bahan yang dipakai kemudian penulis dapat mengolah bahan tersebut yang kemudian

dapat dijadikan jalan untuk mencari jawaban dalam melakukan penelitian.

38 *Ibid.*, hlm. 52.

39 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 177.

**BAB IV.**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Dalam Penindakan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Sumatera Utara**

Berdasarkan tujuan dari kodifikasi dan unifikasi, maka segala tata cara dari suatu proses pidana yang akan diperiksakan diadili oleh lingkungan peradilan umum berdasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya baik Undang- Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempunyai kedudukan yang sejajar, tetapi antara kedua Undang-Undang No.41 Tentang Kehutanan adalah merupakan ketentuan hukum materiel yang berfungsi mengatur dan menetapkan kewajiban, larangan sanksi pidananya, sedangkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981

Tentang KUHAP adalah ketentuan hukum formil yang mengatur cara-cara menetapkan sanksi pidananya secara benar jika terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.40

Dalam hal penyelidikan, penyidik kehutanan sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.

1981 Tentang KUHAP dengan demikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kehutanan diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi

kehutanan pusat atau daerah, yang oleh atas dan kuasa Undang-Undang memiliki

40 Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum perkebunan di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 18.

43

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 50 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kedudukan PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Utara sebagai tenaga fungsional yaitu disamping staf Dinas Kehutanan juga secara tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga fungsional pejabat PPNS yang langsung dibawah Kepala Dinas Kehutanan tapi sehari-hari dibawah binaan adminstrasi kepegawaian Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Utara, kedudukan hak dan kewajibannya sama dengan PNS biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.41

Dasar hukum PPNS Kehutanan diatur didalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yaitu bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Yang dijabarkan dalam Pasal 77 ayat 1

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup dan tugasnya dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penyidikan diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,kawasan hutan, dan hasil hutan.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan.

3. Memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan atau

wilayah hukumnya.

41 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

4. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

5. Menerima keterangan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

6. Menangkap dan menahan dalam kordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 7 ayat 2 (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Membuat dan menandatangani berita acara diatur didalam Pasal 8 ayat 1 (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf i (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa dimulainya penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memberitahu dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI dan hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik POLRI, hal ini dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.

45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yaitu:

*“Dalam rangka kegiatan administarasi penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik POLRI* ”.

Dalam hal dimulainya penyidikan Penyidik PNS menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik POLRI. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan PPNS Kehutanan dalam tindak pidana khusus di bidang Kehutanan yaitu :42

1. Penyidik melakukan pemeriksaan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)

42 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido Putro Aji

Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

2. Melacak dan menangkap pelaku dari tindak pidana tersebut.

3. Pelaku tindak pidana diserahkan kepada POLRI atau Polres setempat untuk pengusutan lebih lanjut.

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan PPNS Dinas Kehutanan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam penanganan kasus tindak pidana khusus bidang kehutanan pada satu ekosistem hutan, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan Penyidik POLRI.

Tahapan-tahapan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional polisi kehutanan dan PPNS kehutanan yaitu:43

1. Menerima laporan / pengaduan masyrakat atau operasi tangkap tangan.

Setelah menerima laporan PPNS langsung Penangkapan tersebut dilakukan oleh PPNS kehutanan di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui oranngya.

2. Penahanan sementara tersangka.

Penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan selama 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang diperoleh PPNS Kehutanan dan juga PPNS Kehutanan membuat keterangan tersebut.

3. Pengumpulan barang bukti

Pengumpulan barang bukti dilakukan PPNS Kehutanan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan untuk mengetahui status dari pelaku tindak pidana.

4. PPNS Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap :

a. Tersangka

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang-Undang telah

43 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido Putro Aji

Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

memberikan beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak azazi serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembenaran diri.

b. Saksi-saksi

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terhadap tersangka hampir sama dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi yang langsung melihat peristiwa tindak pidana itu dilakukan.

5. Pembuatan berita acara penyidikan (BAP)

Hal ini penting dilakukan guna mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik POLRI yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tersebut.

6. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS Kehutanan kepada

Penyidik POLRI

Penyerahan tersangka kepada penyidik POLRI adalah untuk dapat melakukan tindak lanjut dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Setelah dilakukannya tahap-tahap penangkapan tindak pidana oleh PPNS Kehutanan terhadap pelaku tindak pidana, maka dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik POLRI sebagai tindak lanjut yang dilakukan yaitu44 :

1. Setelah PPNS Kehutanan menyerahkan tersangka beserta surat pengantar kepada penyidik POLRI, maka penyidik POLRI melakukan penyidikan lanjut terhadap : Tersangka, Saksi-saksi dan Barang bukti yang cukup kuat.

2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah dilakukan proses pemeriksaan maka penyidik POLRI membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berarti ada tindak pidana yang terjadi, serta merupakan berkas di Kepolisian agar dapat dilaporkan ke Kapolda setempat.

3. Pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan, hal ini dilakukan untuk membela akan kepentingan dari tersangka agar dapat memperoleh

perlindungan hukum hingga menjadi status terdakwa.

44 Hasil wawancara dengan penyidik POLRI Sumut Bripda Alif Shabhana Surya Tanggal

22 Oktober 2022 di Polda Sumut.

Dalam melaksanakan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana khusus di bidang kehutanan khususnya *illegal logging* terdapat ciri-ciri yang khas dalam penanganannya, yaitu45 :

1. PPNS Kehutanan menerima laporan dan mengetahui sendiri telah terjadi suatu tindak pidana bidang kehutanan maka dengan segera PPNS Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2. PPNS Kehutanan kemudian melakukan penahanan selama-lamanya 1-2 hari di kantor PPNS Kehutanan, bila kemudian ditemukan cukup bukti-bukti yang kuat yaitu berupa mesin pemotong kayu, kayu hasil penebangan liar, keterangan saksi lain dari si pelaku (tersangka) untuk selanjutnya diperiksa untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

3. Di dalam proses ini pihak POLRI setempat harus diberitahu oleh PPNS Kehutanan bahwa telah terjadi tindak pidana khusus bidang kehutanan dan si tersangka dalam proses pemeriksaaan.

4. Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Kehutanan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI mengenai proses penyidikan tindak pidana yang terjadi.

5. Bila proses pemeriksaan penyidikan dianggap telah cukup PPNS Kehutanan maka si tersangka diserahkan kepada penyidik POLRI setempat yang disertai BAP dan surat pelimpahan pemeriksaan. Bila proses pemeriksaan dianggap lengkap maka pihak POLRI berkewajiban melengkapinya.

6. Dalam hal proses penyidikan dianggap telah selesai oleh Penyidik PPNS Kehutanan tersebut, maka PPNS Kehutanan segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

7. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik POLRI disertai petunjuk untuk dilengkapi.

8. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dengan petunjuk dari

penuntut umum.

45 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

9. Penyidikan dianggap telah selesai dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Tabel proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*

dapat digambarkan sebagai berikut :

Laporan Terjadinya

Illegal Logging

PPNS dan Polhut menyelidiki kebenaran Informasi

Pengumpulan barang bukti

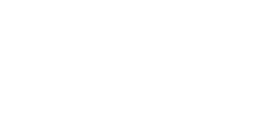
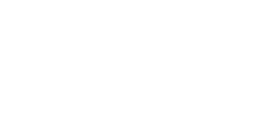
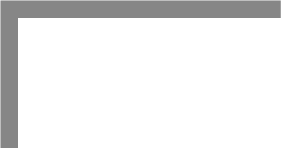
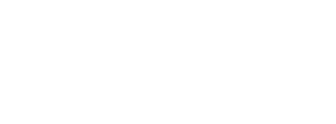
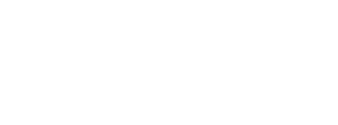
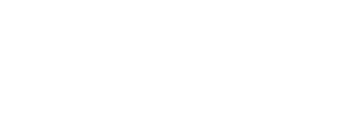
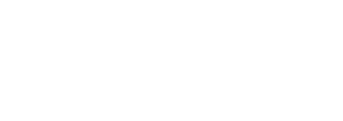
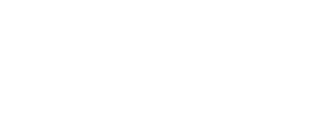
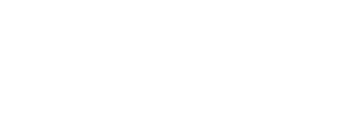
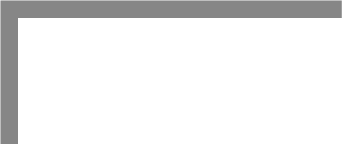
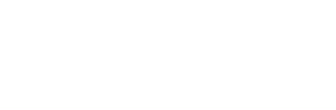
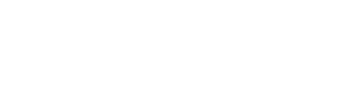
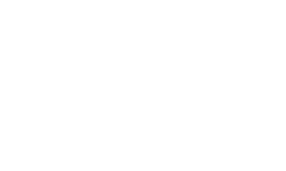
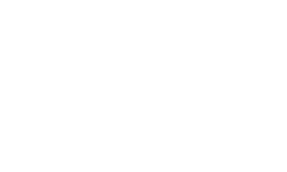
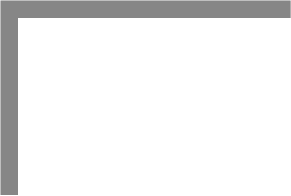
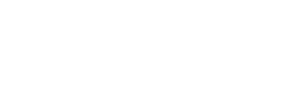
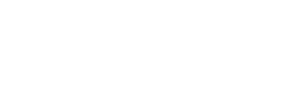
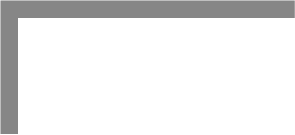
Pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP)

Penangkapan dan

Penahanan sementara oleh PPNS Kehutanan

Penyerahan tersangka ke Polri oleh PPNS

Penyidikan lebih lanjut oleh Polri



Sumber : Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Tahapan pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh PPNS Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara yaitu :46

1. Menerima laporan kejadian / operasi tangkap tangan (OTT).

46 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut.

2. Membuat surat perintah penyidikan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera

Utara.

3. Membuat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara.

4. Membuat berita acara tempat kejadian perkara (melakukan pemeriksaan atas kebenaran laoran atau keterangan kejadian tindak pidana *illegal logging*.

5. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana

*ileggal logging*.

6. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti.

7. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum.

8. Membuat atau menandatangani berita acara.

9. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

10. Membuat surat panggilan :

a. Tersangka. b. Pelapor.

c. Saksi Ahli.

d. Polisi Kehutanan / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

11. Membuat berita acara pemeriksaan untuk tersangka, pelapor, saksi ahli, Polisi

Kehutanan / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

12. Melakukan kordinasi dengan kordinator pengawas (korwas) dari polri dengan membawa perkara yang meliputi pencatatan, pelaporan berita acara, surat menyurat yang telah disusun.

13. Apabila menurut kordinator pengawas (korwas) Polri telah dianggap cukup setelah itu :

a. Penyerahan berkas tahap pertama, hanya penyerahan berkas perkara saja. b. Penyerahan berkas perkara tahap kedua dengan menyerahkan berkas

perkara juga penyerahan tersangka dan barang bukti.

14. Apabila P.21 (berkas dinyatakan lengkap) tinggal menunggu jadwal sidang di

Pengadilan Negeri.

**B. Penyelidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Sumatera Utara**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 4 Pidana (KUHAP). Dalam penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah (Reserse), dimana tugas utamanya adalah menemukan, menerima laporan, mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa, serta dapat memberikan informasi data, dan fakta yang akurat kepada penyidik, untuk dapat segera menentukan sikap, apakah dapat dilakukan penyidikan ditunda atau tidak perlu dilakukan penyidikan.

1. Menemukan Tindak Pidana, merupakan tindakan yang dilakukan petugas fungsional penegakan hukum di bidang kehutanan yang ditemukan, “atas dasar adanya laporan, dan/atau pengaduan dari masyarakat secara lisan atau tertulis dan tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas dan/atau diketahui langsung oleh POLHUT/PPNS Kehutanan, dalam melakukan patroli dan pengamanan. Adanya laporan dari masyarakat dan bisa tertangkap langsung oleh petugas itu sendiri baik POLHUT ataupun PPNS, sedangkan tertangkap tangan, karena tindak pidana illegal logging ini merupakan tindak pidana tertentu/khusus, pada umumnya tertangkap tangan itu ditangani langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polri bersumber dari pelapor, masyarakat serta pihak bersangkutan atas hak dan kewajiban dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging.

2. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, Laporan menurut Pasal 1 angka 24 KUHP yaitu: “Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang- Undang kepada pejabat yang berwenag tentang telah atau sedang diduga akan terjadi tindak pidana.” Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu: “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindakan pidana

aduan yang merugikannya.” Adapun laporan yang diterima penyidik pegawai negeri sipil, Dinas Kehutanan terkait tindak pidana illegal logging dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah laporan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Penyidik PNS Kehutanan

Tahun 2019 s/d 2022

Sumber : Laporan Penanganan Kasus/Perkara TPLHK Dinas Kehutanan Provinsi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah**  **Laporan** |  | **Kasus** | **Ket.** |
| 1 | 2019 | 2 | a.  b. | 1 kasus Penebangan pohon  dalam Kawasan Hutan  1 kasus mengangkut, menguasai, memiliki kayu hasil hutan. | P.21  P.21 |
| 2 | 2020 | 2 | a.  b. | 1 kasus Menebang pohon  dan mengeluarkannya dalam bentuk kayu olahan dalam berbagai ukuran  1 kasus ditemukan alat pengolahan kayu *Illegal* | P.21  P.21 |
| 3 | 2021 | 5 | a.  b. c.  d. | 1 Kasus pembuatan jalan  dengan menggunakan alat berat berupa excavator di dalam kawasan hutan tanpa izin  1 kasus ditemukan alat pengolahan kayu *Illegal*  2 kasus Menebang pohon dan mengeluarkannya dalam bentuk kayu olahan dalam berbagai ukuran  1 kasus pengamanan kayu illegal logging yang berasal dari Kawasan hutan | P.21  P.21  P.21  P.21 |
| 4 | 2022 | 1 | 1 kasus pengamanan kayu  illegal logging yang berasal dari Kawasan hutan | | P.21 |
| Sumatera Utara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 – 2022 | | | | | |
|

3. Penentuan tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan penyidik dengan menindaklanjuti suatu laporan. Penentuan tindak pidana yaitu dengan melakukan pemeriksaan terpenuhi atau tidak adanya unsur pidana dan bukti permulaan, atas keterangan, catatan, dan dokumen berkenaan dengan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan sehingga dapat dilakukan penyidikan, dan guna membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut, untuk menghindari tindakan penyelidikan yang menimbulkan praperadilan dan pelangaran HAM.

4. Pemberitahuan Dimulainya Peyidikan, Merupakan tindakan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dengan melampirkan laporan kejadian, surat perintah penyidikan dari atasan penyidik pegawai negeri sipil dan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat.

**C. Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Sumatera Utara**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan melakukan:

1. Penetapan Tersangka atas hasi laporan dari proses penyelidikan yang diajukan melalui Surat SPDP, apakah tersangka dapat dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan unsur pasal dan barang bukti yang cukup sebagaimana di dalam ketentuan hukum pidana perusakan hutan.

2. Penangkapan, Dalam Pasal 1 angka 20 KUHP dicantumkan arti penangkapan, yaitu: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau/dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Menurut PPNS kehutanan Sabarudin, SH., Mengemukakan penangkapan dilakukan untuk

kepentingan penyidikan mengusut atau memeriksa lebih dalam keterkaitanya tersangka di bidang tindak pidana illegal logging tersebut, guna mendapatkan keterangan adanya barang bukti, dan tersangka baru. Adapun jumlah tersangka tindak pidana illegal logging yang ditangkap oleh penyidik pegawai negeri sipil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jumlah tersangka dan tempat kejadian perkara tindak pidana *illegal logging* yang ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019-2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jumlah**  **Laporan**  **Kejadian** | **Tempat Kejadian**  **Perkara (TKP)** | **Jumlah**  **Tersangka** | **Ket.** |
| 2019 | | | | |
| 1 | 2 | Kab. Langkat | 2 | PN Stabat |
| 2020 | | | | |
| 1 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| 2 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| 2021 | | | | |
| 1 | 1 | Kab. Langkat | 2 | PN Stabat |
| 2 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| 3 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| 4 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| 5 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| 2022 | | | | |
| 1 | 1 | Kab. Langkat | 1 | PN Stabat |
| Sumber : Laporan Penanganan Kasus/Perkara TPLHK Dinas Kehutanan Provinsi | | | | |

Sumatera Utara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 – 2022

3. Penahanan, dalam Pasal 11 angka 21 KUHAP menyatakan: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dan/atau penuntut umum dan/atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” yaitu: Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), penahanan Rumah, penahanan Kota. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dengan mempertimbangkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan

diri, mengulangi perbuatan, mehilangkan barang bukti dan mempersulit penyidikan. Dalam penahanan dilakukan atas dasar intrupsi dari atasan PPNS, Penuntut Umum, dan Hakim.

4. Penggeledahan, terhadap pengeledahan terdapat dua jenis, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan, Pasal 1 angka 17 KUHAP menentukan, pengeledahan rumah sebagai berikut: “Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penagkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini” Selanjutnya Pasal 1 angaka 18 KUHAP mencantumkan arti “pengeledahan badan” sebagai berikut: “Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengandakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita.” Kegiatan pengeledahan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat-tempat tertutup dan megeledah badan seseorang guna mencari dan mendapatkan barang bukti dan/atau mendahului tindakan penagkapan terhadap tersangka untuk menekan peluang serangan dari tersangka kepada petugas.

5. Penyitaan, dalam Pasal 1 angka 16 yang berbunyi sebagai berikut: “Penyitaan adalah: Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasanya, terhadap benda/barang tagihan tersangka baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah diketahui berkaitan dengan perkara yang ditangani, untuk kepentingan penyidikan.” Barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

a. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana.

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk tindak pidana

c. Benda dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.

d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung

Adapun barang bukti dalam tindak pidana illegal logging hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Jumlah barang bukti tindak pidana *illegal logging* yang disita PPNS Kehutanan

Tahun 2019 s/d 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Barang Bukti | Sebanyak | Ket. |
| 2019 | | | |
| 1 | Kayu | 198 Batang | P.21/vonis |
| 2020 | | | |
| 1 | Gergaji mesin (*chainsaw*) | 1 Unit | P.21/Kejaksaan Negeri |
| 2 | Kayu broti | 41 Batang |
| 3 | Kayu papan | 34 Lembar |
| 4 | Jerigen | 1 Buah |
| 4 | Kayu broti | 20 Batang | P.21/Kejaksaan Negeri |
| 5 | Kayu papan | 2 Lembar |
| 2021 | | | |
| 1 | Alat berat Excavator | 1 Unit | P.21/vonis |
| 2 | Kayu broti | 20 Batang | P.21/vonis |
| 3 | Kayu Papan | 2 Lembar |
| 4 | Gergaji mesin (*chainsaw*) | 1 Unit | P.21/vonis |
| 5 | Kayu broti | 41 Broti |
| 6 | Kayu papan | 34 Lembar |
| 7 | Jerigen | 1 Buah |
| 8 | Kayu broti | 14 Batang | P.21/vonis |
| 9 | Kayu papan | 42 Lembar |
| 10 | Sepeda motor | 2 Unit |
| 11 | Parang | 1 Buah |
| 12 | Senter | 1 Buah |
| 13 | Truk | 1 Unit | P.21/vonis |
| 14 | Kunci mobil | 1 Buah |
| 15 | Handphone | 1 Buah |
| 16 | Kayu olahan | 39 Batang |
| 2022 | | | |
| 1 | Kayu olahan | 39 Batang | P.21/Proses Sidang |
| 2 | Handphone | 1 Buah |
| 3 | Truk | 1 Unit |

Sumber : Laporan Penanganan Kasus/Perkara TPLHK Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 – 2022

6. Pemeriksaan Surat dan Penyitaan, dalam Pasal 47 KUHAP disebutkan bahwa: “Penyidik berhak membuat, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telkomunikasi, jasa pengiriman barang dan angkuta, untuk diserahkan kepadanya surat yang berhubungan dengan perkara pidana kehutanan, “guna dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka penebangan liar (Illegal logging) tersebut, dalam hal menyita surat untuk kepentingan penyidikan lanjud, dengan surat perintah penyitaan dan izin khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri setempat.” Adapun surat- surat atau dokumen dalam tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) yaitu:

a. Surat pemanfaatan hutan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang,

b. Peta penetapan kawasan huta yang diproduksi, c. Buku rekening para pelaku,

d. Kutansi transaksi jual beli hasil hutan yang illegal, e. Surat izin pengangkutan hasil hutan.

7. Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.

8. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi: “Berita acara dibuat untuk setia tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan di tempat kejadian. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan pidana. Pembuatan berita acara dilakukan penyidik, untuk dijadikan sebagai resume atau ihktisar kasus dari hasil pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan menjadi isi berkas perkara.

**D. Pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum (JPU)**

Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik pegawai negeri sipil, berupa pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari penyidik ke penuntut umum, berupa penyerahan tahap III berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepada penuntut umum, dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut tidak dikembalikan oleh penuntut umum, penyidik diangap lengkap berkas perkaranya dengan diterbitkannya Surat (P.21), Tahap II: yaitu berupa penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti, guna dilakukan pemeriksaan lanjud di persidangan.

**E. Hambatan-Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan**

**Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Sumatera Utara**

Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama sektor kehutanan, kejahatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi berakibat, pada rusaknya kondisi hutan saat ini. Hutan yang sebenarnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dimana masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil yang didapat dari hutan antara lain kayu yang merupakan hasil utama dari hutan. Serta berbagai hasil hutan seperti : rotan, getah, buah-buahan dan lain-lain.47 Selain manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, banyak lagi manfaat secara tidak langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat seperti, hutan yang dapat menjaga terjadinya erosi sebagai penyebab terjadinya banjir, dapat juga memberikan manfaat di sektor pariwisata dan lain-lain. Untuk itu perlu perlindungan maksimal terhadap hutan.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam prakteknya tidak semudah seperti apa yang dikemukakan di atas. Dibawah ini penulis menguraikan beberapa kendala yang menghambat penyidikan terhadap

tindak pidana *illegal logging*. Adapun yang menjadi hambatan-hambatan Penyidik

47 Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 46.

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Hambatan pada sektor aturan hukum.

Yaitu seperti dalam tumpang tindihnya aturan hukum, sejalan dengan perkembangan Undang-Undang, peraturan peraturan di daerah provinsi, kabupaten / kota di berbagai wilayah indonesia, khusus terhadap perkembangan peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan seperti Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat (IPKMA) oleh Bupati dapat menjadi tumpang tindih dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Peraturan daerah tersebut dibuat pada umumnya lebih mengutamakan kepentingan daerah untuk peningkatan pendapatan daerah. Hasil pungutan hasil hutan yang didasari pada Peraturan Daerah setempat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Dengan demikian Peraturan daerah lebih mengutamakan pelaksanaan Peraturan Daerah daripada harus melaksanakan ketentuan Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kewenangan daerah untuk menentukan perizinan Hak Pengusaan Hutan (HPK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersentralisasi di tangan bupati / walikota dapat dijadikam sumber legitimasi dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu secara besar-besaran ini dapat menyebakan kerusakan hutan. Selain itu penyidik perwira Angkatan Laut (AL) juga dapat melakukan penyidikan dalam hal terjadinya penyelundupan kayu keadaan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam praktek *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-senditi dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Terkadang juga muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus di dalam tindak pidana

kehutanan yang diberikan kewenangan masing-masing oleh Undang-Undang.48

2. Hambatan pada sektor aparat.

Dalam sektor aparat seperti jumlah anggota PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan di Sumatera Utara yang terbatas tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang ada. luas kawasan hutan yang ada di Sumatera Utara berdasarkan data yang diperoleh dari laporan stastistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yaitu 3.055.795 hektar atau 51,27 % dari luas wilayah Sumatera Utara

7.298.100 hektar dari luasan hutan tersebut terdiri dari :

a. Hutan Lindung : ± 1.206.881 hektar b. Hutan Konservasi : ± 427.008 hektar

c. Hutan Produksi : ± 704.452 hektar d. Hutan Produksi Terbatas : ± 641.769 hektar e. Hutan Produksi Konversi : ± 75.684 hektar

Luasnya kawasan hutan yang ada di daerah Sumatera Utara ini tentu tidak sebanding dengan jumlah personil pengamanan hutan. Menurut data yang diperoleh jumlah PPNS Kehutanan di Sumatera Utara berjumlah 54 orang dan jumlah Polisi Kehutanan sebanyak 121 orang yang terbagi didalam kab/kota di Sumatera Utara. Dengan luas kawasan hutan yang dijaga oleh PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan sebanyak 3.478.468 hektar berarti seorang PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan menjaga 25.678 hektar hutan, semestinya 1 orang Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan berdasarkan ratio 1 : 5000 hektar hutan jadi seharusnya 3.478.468 hektar : 5000 hektar hutan = 695 Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan idealnya dibutuhkan 5 orang disetiap instansi kehutanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Utara kalau berdasarkan ratio tersebut. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi aparat untuk dapat menjaga dan menyidik kasus-kasus tindak pidana *illegal logging*.49

Kurangnnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dari PPNS 9 Kehutanan

48 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

49 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

hal ini dikarenakan tidak semua PPNS yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara berlatar belakang pendidikan bukan di dibidang hukum, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari PPNS itu sendiri dalam hal teknik dan teknis penyidikan, juga akan mempengaruhi kinerja PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi kebijakan hukum yang dirumuskan didalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu tingkat keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakan (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan kareteristik yang khas dari tindak pidana *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus. Konsenkuensi logisnya,PPNS Kehutanan harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan serta harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materill maupun peristiwa hukum yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*.50

3. Hambatan pada sektor sarana dan prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana yang menjadi hambatan PPNS Kehutanan Sumatera Utara yaitu dalam proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan sarana yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan Sumatera Utara. Dalam hal penahanan sementara oleh PPNS Kehutanan ketika tersangka atau pelaku tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *illegal logging* tertangkap tangan atau ditangkap PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Utara memiliki keterbatasan ruangan untuk melakukan penahanan sementara terhadap pelaku apabila jumlah pelaku melebihi kapasitas ruangan tahanan sementara sehingga dibutuhkan MoU dengan pihak rumah tahanan negara terdekat untuk melakukan penahanan sementara tersebut agar

tidak menjadi hambatan PPNS Kehutanan dalam proses pemeriksaan sementara

50 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

terhadap pelaku tindak pidana kehutanan khususnya bidang *illegal logging*.

Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut , maka penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* akan sedikit mengalami hambatan dan kan memakan waktu yang lama, tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Sumatera Utara, dengan minimnya anggaran, maka PPNS Dinas Kehutanan harus dapat mengoptimalkan sebaik mungkin.51

4. Hambatan pada sektor Masyarakat

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk ke dalam kelompok miskin juga menjadi hambatan oleh PPNS Kehutanan Sumatera Utara karena keterbatasan akses dan rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Realitas ini dimanfaatkan oleh para cukong dan para pemillik modal melalui praktek *illegal logging*. Masyarakat dijadikan ujung tombak dilapngan dalam praktek *illegal logging* yang menghasilkan kondisi rusaknya sumber daya hutan.

Melalui masyarakat juga, para cukong dan pemilik modal *illegal logging* bersembunyi dan selalu mengadu domba keduanya. Banyaknya masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan yang bergabung dalam kelompok *illegal logging* berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Akibatnya, faktor masyarakat menjadi kendala utama yang dihadapi oleh PPNS Kehutanan dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging*, terutama saat melakukan pemeriksaan dilapangan. Selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berada di sekitar atau di dalam hutan, menyebakan masyarakat memanfaatkan hasil

hutan, khususnya kayu tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan.52

51 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut

52 Hasil wawancara dengan PPNS Dinas Kehutanan Prov Sumut Muhammad Alfin Rido

Putro Aji Tanggal 20 Oktober 2022 di Dinas Kehutanan Prov Sumut